

Indeks Demokrasi Jateng Ditarget Naik ke Level 70,25

SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menargetkan indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2017 untuk Provinsi Jateng pada level 70,25 dalam skala 0-100.

Sementara itu, peringkat IDI Jateng pada 2016 belum menggembirakan, yakni pada level 66,71. Level ini masuk kategori sedang, namun secara nasional IDI Jateng 2016 menempati peringkat enam terendah dari 34 provinsi.

Paparan itu disampaikan Kepala BPS

Provinsi Jateng, Margo Yuwono dalam Focus Discussion Group (FGD) "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 Provinsi Jateng" di Hotel Novotel Semarang, Selasa (5/6). Adapun pelaksanaan FGD IDI berlanjut pada hari kedua, Rabu (6/6).

Margo menjelaskan, dalam pengukuran IDI 2017 masih menggunakan metodologi sama yang telah digunakan sejak 2009, yakni mengumpulkan data dari berita-berita tentang peristiwa yang menghambat demokrasi dari surat kabar,

dan dokumen-dokumen resmi atau surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun untuk surat kabar, IDI Jateng hanya menggunakan data dari berita-berita di *Suara Merdeka*.

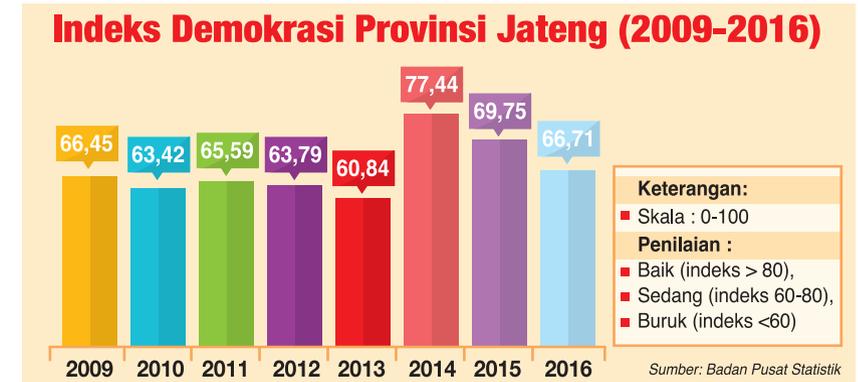
"Kami mengumpulkan berita-berita sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 sesuai dengan tiga aspek IDI, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Lebih detail lagi ketiga aspek ini dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator," jelas Margo.

Dia menambahkan, perkembangan IDI Jateng pada 2015-2016, terdapat tiga variabel yang mengalami kenaikan, yakni kebebasan berpendapat, peran DPRD, dan peran partai politik. Kemudian empat variabel menurun, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, dan peran birokrasi pemerintah daerah. Untuk empat variabel lainnya tetap, yakni hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu yang bebas dan adil, serta peran peradilan yang independen.

Meningkatkan Indeks

Sementara itu, narasumber Teguh Yuwono, Ketua Program S-2 Magister Ilmu Politik dan Dosen DPP FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, memaparkan strategi meningkatkan indeks demokrasi pada ketiga aspek tersebut, termasuk peran birokrasi pemerintah daerah dan media massa.

"IDI adalah indikator komposit yang



menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintah daerah perlu mendorong berkembangnya tiga aspek utama IDI tersebut secara baik dan proporsional. Hal ini melibatkan *stakeholder* yang meliputi aktor suprastruktur dan infrastruktur politik. Selain itu, mendorong media massa berjalan secara baik dan profesional dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi," katanya.

Untuk pelaksanaan FGD IDI Jateng 2017, merupakan tahap verifikasi atas data-data yang dikumpulkan sepanjang 2017 berdasarkan 11 variabel dan 28 indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya, hasil diskusi akan dikirim ke BPS pusat untuk dilakukan pengukuran indeks secara nasional. Diskusi pun berlangsung semarak, terutama ketika peserta menemui berita yang dimasukkan dalam indikator dan dinilai tidak relevan, sehingga memicu perdebatan.

"Semua data dalam 11 variabel dan 28

indikator ini sebelumnya sudah kami kirim ke BPS pusat dan telah mendapat persetujuan, sehingga kami tidak berwenang mengubahnya. Dalam FGD ini kami hanya melakukan verifikasi atas data-data tersebut, semua masukan dari peserta kami catat dan kami rekam, lalu kami kirim kembali ke pusat. Selanjutnya masih ada tahap wawancara mendalam dengan tim ahli, dan hasil akhir yang menentukan adalah BPS pusat," jelas Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jateng, Martin Suanta yang memimpin diskusi.

Menurut Kasubdin Wawasan Kebangsaan Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, Dewi Sri S, hasil IDI 2017 secara nasional akan diumumkan pada Agustus 2018, sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI. (sb-46)



SM/Sarby

FGD IDI Jateng : Ketua Program S-2 Magister Ilmu Politik dan Dosen DPP FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono (kanan), Kepala BPS Provinsi Jateng, Margo Yuwono (tengah), dan Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Jateng, Martin Suanta (kiri), berbicara pada Focus Discussion Group (FGD) "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 Provinsi Jateng" di Hotel Novotel Semarang, Selasa (5/6). (46)